

**SINKRONISASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PERIZINAN
PERTAMBANGAN DAN KEWENANGAN FISKAL DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KOTA PADANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum



Diajukan Oleh

Afifah Rahmi Putri

2320113011

Pembimbing:

Dr. Yuslim, S.H., M.H.

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**SINKRONISASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PERIZINAN
PERTAMBANGAN DAN KEWENANGAN FISKAL DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA
PADANG**

*Afifah Rahmi Putri, 2320113011, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2026*

ABSTRAK

Reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berjalan secara sinergis berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Namun dalam praktiknya, pembagian urusan tersebut tidak selalu menghasilkan keselarasan, terutama ketika dua urusan yang secara substansial saling berkaitan diletakkan pada dua tingkat pemerintahan yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, *pertama* bagaimana Konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang?, *kedua* bagaimana implikasi yuridis pemisahan kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan pemungutan pajak MBLB di Kota Padang?, *ketiga* Bagaimana model sinkronisasi kewenangan yang ideal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan didukung data Empiris. Adapun hasil penelitian ialah UU HKPD membawa perubahan paradigmatis dalam sistem perpajakan daerah dengan memperkenalkan mekanisme opsen pajak sebagai pengganti sistem bagi hasil untuk beberapa jenis pajak tertentu. Bapenda Kota Padang sebagai instansi pemungut pajak MBLB dan Dinas ESDM sebagai instansi penerbit IUP MBLB seharusnya saling koordinasi antar satu sama lain, dan melakukan pengawasan lapangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah yang meliputi pengawasan berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi pajak, dan sumber informasi lainnya. Integrasi sistem informasi ini bukan sekadar menghubungkan dua basis data yang berbeda, melainkan menciptakan ekosistem data yang memungkinkan pertukaran informasi secara otomatis dan real-time.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Kewenangan, Tambang, Pajak, Mineral bukan Logam dan Batuan.*

SYNCHRONIZATION OF MINING LICENSING AND REGIONAL FISCAL AUTHORITIES IN THE MANAGEMENT OF NON-METALLIC MINERALS AND ROCKS TAX IN PADANG CITY

*Afifah Ragmi Putri, 2320113011, Master of law, Faculty of law,
Andalas university, 2026*

ABSTRACT

The reform of the regional government system in Indonesia, marked by the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, requires that the division of governmental affairs among the central government, provincial governments, and regency/municipal governments be carried out synergistically based on the principles of accountability, efficiency, and externality. In practice, however, this division of affairs does not always produce alignment, particularly when two substantially interrelated affairs are placed at two different levels of government without an adequate coordination mechanism. On this basis, the problems examined in this research are: first, how is the legal construction of mining licensing authority and regional fiscal authority in the management of the Non-Metallic Mineral and Rock (MBLB) Tax in the City of Padang; second, what are the juridical implications of the separation between mining licensing authority and the authority to collect the MBLB Tax in the City of Padang; and third, what is the ideal model of authority synchronization between the provincial government and the regency/municipal government in the management of the Non-Metallic Mineral and Rock Tax. The research method used is the juridical-empirical method, supported by empirical data. The results of the research show that the Law on Financial Relations between the Central and Regional Governments (UU HKPD) brings a paradigmatic change to the regional taxation system by introducing the opsen (tax surcharge) mechanism as a replacement for the revenue-sharing system for certain types of taxes. The Regional Revenue Agency (Bapenda) of the City of Padang, as the institution collecting the MBLB Tax, and the Energy and Mineral Resources Office (Dinas ESDM), as the institution issuing the MBLB Mining Business License (IUP), should coordinate with one another and conduct field supervision in accordance with Government Regulation Number 35 of 2023, which regulates the mechanisms for the supervision and examination of regional taxes, encompassing supervision based on monitoring reports, public reports, media coverage, field visits, analysis of tax realization developments, and other sources of information. This integration of information systems is not merely a matter of connecting two different databases, but rather of creating a data ecosystem that enables the automatic and real-time exchange of information.

Keyword: Implementation, Authority, Mining, Tax, Non-Metallic Minerals and Rocks.